



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI
: NASIONAL
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SUJADI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM
3. NHK : 237173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.547.500.000**

1. Tanah Seluas 1580 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1750 m2/650 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 437.500.000
3. Tanah Seluas 1900 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 475.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 674.850.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.350.000



6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

7. MOBIL, MITSUBISI EXPANDER MINIBUS Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 240.000.000

8. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 415.649.538

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.677.999.538

III. HUTANG Rp. 29.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.648.999.538

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.